

TELAAH EPISTEMOLOGI POSITIVISME DAN FENOMENOLOGI (SEBUAH PERBANDINGAN)

M. Sanusi

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Antropologi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
em_san05@yahoo.co.id

ABSTRACT

Epistemology is begun based on the need of philosophy used to recite social-cultural events. Nowadays, development of epistemology is fast enough as a proof of a thinking way which is growing in academic and reasearch, especially in social-cultural science. The growing epistemology are positivism, materialism, structuralism, hermeneutics and phenomenology. Epistemology does not appear explicitly in reasearch yet it is always there. Scientists and researchers should be aware what epistemology is to use. It gives the benefit in the strength of the research. This article delivers about growing epistemology in social sciences. The two kinds of epistemology discussed in this article used comparison approach; that is comparing both to find out the similarities and the differences. Positivism is epistemology used in many social-cultural researchs while phenomenology responds positivism and shows critic on it.

Keyword: *Epistemology, Positivism, Phenomenology, Social-cultural Science, Natural Science.*

I. PENDAHULUAN

Secara sederhana epistemologi bisa dikatakan sebagai teori ilmu pengetahuan atau *theory of knowledge*. Sebagai sebuah teori ilmu pengetahuan, jelas yang dipelajari adalah tentang pengetahuan secara keseluruhan, baik cara mendapatkannya, batasannya, definisi pengetahuan, maupun jenis-jenis pengetahuan itu sendiri. Epistemologi dalam literatur dan pembahasan filsafat kerap disebut sebagai filsafat ilmu—walaupun menurut penulis istilah ini kurang tepat karena yang dipelajari bukan saja ilmu pengetahuan, tetapi juga pengetahuan itu sendiri, yang dewasa ini dibedakan antara ilmu (*science*) dan pengetahuan (*knowledge*). Sebagai alternatif, penyebutan ini bisa dirubah menjadi ‘filsafat pengetahuan.’

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 416), epistemologi diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Dari definisi ini kita melihat epistemologi adalah cabang dari ilmu filsafat, dan tentu epistemologi sendiri adalah sebuah ilmu. Sementara menurut J. Sudarminta (2002), epistemologi adalah

cabang ilmu filsafat yang secara khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan. Istilah *epistemologi* sendiri berasal dari kata Yunani *episteme*, yang berarti *pengetahuan*, dan *logos* yang berarti *perkataan, pikiran, atau ilmu*. (J. Sudarminta, 2002: 18).

Akan tetapi penting diketahui bahwa menurut Habermas, dalam Magnis-Suseno (2005), filsafat pengetahuan alias epistemologi tidak bisa lepas dari apa yang namanya kepentingan. Dalam arti, tidak ada satu pun pengetahuan yang bebas nilai. Sejak semula, dalam merumuskan kalimat-kalimat dasar mereka, setiap pengetahuan sudah diresapi secara hakiki oleh kepentingan-kepentingan vital manusia. Karena itu sangat penting bagi kita semua untuk memperhatikan setiap kepentingan, karena kalau kita tidak memperhatikannya, menganggap setiap penelitian-penelitian yang kita lakukan sebagai obyektif, kita akan buta terhadap pengaruh kepentingan-kepentingan kita atas cara kita memahami realitas. Kita menganggap hasil penelitian kita obyektif padahal sesuatu itu tidak semata-mata

obyektif, dan ini berarti kita dibutakan secara ideologis. (Magnis-Suseno, 2005: 159).

Senada dengan Habermas, pemikir post-strukturalis Perancis Michel Foucault juga menegaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan bukanlah dua hal yang berbeda. Kebenaran pengetahuan semata-mata bukan masalah kesesuaian pikiran (teori) dengan realitas, tetapi masalah bagaimana sebuah *form of knowledge* ilmiah dibentuk oleh aturan main khusus yang berupa proposisi. Sehingga kata Foucault, menerima atau menolak kebenaran sebuah proposisi ilmiah tertentu merupakan...*the poitics of the scientific statemen....* Dengan kata lain, kebenaran sebuah pengetahuan adalah masalah politik diskursus, alias masalah kekuasaan. (Irianto, ddk, 2006: 19-20)

Karena sebuah ilmu, epistemologi memiliki struktur keilmuan yang terdiri dari aliran atau jenis yang berfungsi sebagai penjabaran dari epistemologi itu sendiri. Penulis hanya berfokus untuk membahas dua aliran dalam epistemologi, yaitu positivisme dan fenomenologi. Kedua aliran epistemologi ini merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan yang sama-sama mempunyai kelebihan sekaligus kelemahan.

Tidak hanya positivisme dan fenomenologi, aliran epistemologi banyak jenisnya, di antaranya adalah strukturalisme, post-modernisme, empirisme, materialisme, rasionalisme, bahkan ada yang mengatakan skeptisisme.¹ Ada dua alasan penulis mengambil positivisme dan fenomenologi sebagai obyek kajian perbandingan. *Pertama*, karena dua epistemologi ini sangat berbeda dalam hal memandang pengetahuan, dimana perbedaan ini sangat jauh terlihat tidak hanya dalam metodenya, tetapi tentang definisi pengetahuan itu sendiri. Sehingga menurut penulis, kedua epistemologi ini selain sangat kontras di satu sisi, tetapi juga bisa menjadi

¹Mengenai aliran epistemologi, sampai saat ini masih terus terjadi dinamika apakah suatu paradigma bisa menjadi epistemologi. Seperti pragmatisme, apakah dia bagian dari epistemologi atau sekedar paradigma. Para ahli masih belum sampai pada kesimpulan final mengenai hal ini.

saling melengkapi karena sifat kontrasnya tersebut.

Kedua, karena kedua epistemologi ini sering digunakan dalam ilmu sosial, dalam arti telah cukup kuat aspek operasionalnya, sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut, dikritisi, sekaligus direfleksikan agar semakin jelas pemahaman kita tentang kedua epistemologi ini. Berbeda misalnya dengan epistemologi rasionalisme dan empirisme *an sich*, yang tidak cukup operatif untuk diaplikasikan dalam keilmuan sosial-budaya dewasa ini. Dalam makalah ini penulis berfokus untuk menjawab soal-soal mengenai apa itu positivisme dan fenomenologi, persamaan dan perbedaannya? Kemudian apa saja kritik yang ditujukan kepada dua epistemologi ini?

II. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud, 2011;31) Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. (Sholeh, 2005;63) Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

III. PEMBAHASAN

Positivisme: Satu Epistemologi, Satu Ilmu, Satu Dunia

Positivisme pertama-tama digunakan oleh Saint Simon dan baru kemudian disebarkan oleh Auguste Comte (1798-1857) dalam bukunya *Cours de Philosophie Positive* (1830). Inti pemikirannya adalah menolak segala pemikiran kefilosofan yang spekulatif dan teologis. Atau, dipandang dari perspektif evolusi, tahapan terakhir dari corak berfikir, yakni teologis, metafisis, dan positif. (Ahliab Watloly, 2001: 80)

Menurut George Steinmetz dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Method in the Human Science* (2005), sebagaimana dikutip Riley (2007) istilah positivisme sendiri setidaknya memiliki tiga makna. *Pertama*, sebuah tahapan dalam evolusi sosial (*sosial evolution*) sebagaimana dijelaskan oleh Comte dan Durkheim, dimana Comte membagi tiga tahap pemikiran manusia menjadi *teologis*, *metafisik* dan *positiv*. *Kedua*, positivisme merujuk kepada sebuah penyebutan tradisi filsafat, yang dikenal dengan *logical positivism*, tokohnya adalah Wittgenstein dan kelompok *Viena Circle*. *Ketiga*, positivisme merujuk kepada seperangkat praktik penelitian keilmuan, yang dikenal dengan *positivisme metodologis*.

Positivisme metodologis ini juga merujuk kepada konsep pengetahuan, konsep realitas sosial, dan konsep dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Positivisme dalam level ini masih dibagi tiga lagi, yaitu, pertama—positivisme yang berkaitan dengan *konsep pengetahuan*—adalah sebuah epistemologi, yang mengidentifikasi ilmu pengetahuan dengan membuat hukum-hukum, seperti pernyataan, “jika A terjadi, maka B mengikuti.” Kedua—positivisme yang berkaitan dengan *konsep realitas*—adalah sebuah ontologi yang menyamakan realitas dengan objek yang bisa diobservasi. Ketiga, positivisme berasosiasi dengan pemahaman diri tentang aktivitas ilmiah dimana ilmu pengetahuan sosial tidak bergantung pada realitas yang dideskripsikannya. (Riley, 2007: 115).

Pertama-tama kita harus keluar dari kerumitan istilah positivisme ini, dalam terminologi yang ternyata tidak hanya memiliki satu arti. Kita harus mendudukan dulu positivisme apa yang ingin kita bahas, apakah positivisme dalam pengertian sebuah tahapan tradisi berfikir menurut Comte, positivisme dalam pengertian filsafat sebagaimana diusung oleh kelompok Lingkaran Wina, atau positivisme sebagai sebuah epistemologi. Sesuai dengan judul, maka yang akan penulis bahas adalah

positivisme dalam pengertian yang terakhir, yakni sebagai sebuah epistemologi.

Prinsip Positivisme

Untuk mencapai maksud ini, penulis mengambil definisi positivisme dari salah seorang ahli filsafat Kolakowski, yang dikutip Bryant dalam bukunya *Positivism in Social Theory and Research: Theoretical Traditions in The Social Sciences* (1985). Bryant menulis:

“...In his ‘overall view’, Kolakowski presents positivism as ‘a collection of rules and evaluative criteria for referring to human knowledge’, and as ‘a normative attitude, regulating how we use such terms as “knowledge”, “science”, “cognition” and “information”’, (1966, p. 11). There are four main rules (K1-K4) and they indicate what counts as knowledge and what may reasonably be asked.” (Bryant, 1985: 2)

Kolakowski berpendapat bahwa “positivisme adalah kumpulan aturan dan kriteria evaluasi yang merujuk kepada pengetahuan manusia”, dan sebagai “sikap normatif, yang mengatur bagaimana kita menggunakan beberapa istilah sebagai ‘pengetahuan’, ‘ilmu pengetahuan’, ‘kognisi’ dan ‘informasi’”. Selanjutnya, Bryant menjelaskan ada empat aturan utama dalam positivisme, dan aturan tersebut mengindikasikan apa yang disebut pengetahuan.

Adapun empat aturan tersebut adalah:

a. Aturan Fenomena (*rule of phenomea*)

Dalam aturan ini para positivis yakin bahwa kita hanya bisa mengetahui obyek yang sejatinya bisa diamati atau diindra. Untuk obyek yang tidak bisa diamati, sehingga keberadaannya tidak bisa diindra dan dirasakan, diakui sebagai diluar ilmu pengetahuan. Dengan begitu, positivisme kemudian tidak memberi tempat kepada metafisika. Positivisme hanya mengakui eksistensi, tetapi menolak esensi, sehingga setiap penjelasan tentang setiap hal yang tidak punya kedudukan dalam pengalaman, tidak bisa diterima. (Bryant: 1985: 2-3). Dan walaupun metafisika bisa dijelaskan dengan rasional, itu tergantung kepada “bahasa” untuk

menjelaskannya. Di sinilah positivisme sampai kepada kesimpulan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang bahasa, sebagaimana yang diyakini oleh Wittgenstein, seorang filosof-positivis dari Austria.

- b. Aturan Nominalisme (*rule of nominalism*)
Aturan nominalisme sebagai akibat dari aturan yang pertama. Aturan ini menyatakan bahwa setiap penjelasan tentang sesuatu (*insight*), tidak mengacu kepada apapun selain kepada fakta individual. Jadi, bagaimanapun umumnya istilah-istilah yang digunakan untuk merumuskan atau memaparkan suatu pemahaman, acuan rumusan tersebut tetaplah fakta-fakta individual. Menurut aturan nominalisme, setiap ilmu pengetahuan yang abstrak tidak lain adalah sebuah metode untuk meringkas (*abridging*) perekam pengalaman, ilmu tersebut tidaklah memberi kita tambahan apa-apa, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan tersebut dapat membuka jalan menuju sebuah kawasan realitas lain yang secara empiris sebenarnya tidak dapat kita gapai. (Imam Subchi, 2001:392) Karena itu dalam aturan ini metafisika dianggap sebagai fiksi karena metafisika tidak punya dasar yang jelas untuk mengacu kepada sesuatu yang memiliki eksistensi. Artinya, dalam aturan nominalisme, setiap penjelasan harus mengacu kepada fakta individual yang spesifik atau partikular dan memiliki eksistensi, di luar itu tidak ada fakta lain yang pantas dirujuk, kecuali ingin menjadi metafisika, sebuah penalaran yang tidak lebih dari fiksi. (Bryant: 1985: 4-5)
Dalam aturan ini, kalau boleh penulis sederhanakan, setiap pernyataan dalam keilmuan selalu harus mengacu kepada "faktakecil", yaitu fakta yang berada dalam tahap individual. Apa tahap individual ini? Fakta yang hanya diketahui atau diperoleh dari sudut pandang seorang individu atau peneliti. Bukan fakta keseluruhan yang

melampaui pandangan individu ini. Jika kita berbicara tentang ritual sabung ayam di Bali misalnya, ini hanya pembicaraan yang berasal dalam aras individual, yakni peneliti sendiri, bukan dari keseluruhan yang dilihat oleh masyarakat.

- c. Aturan yang menolak Pengadilan Nilai dan Pengetahuan Pernyataan Normatif (*the rule that refuses to call value judgments and normative statements knowledge*)
Menurut aturan fenomenalisme, kita wajib menolak asumsi nilai sebagai karakteristik dunia karena tidak dapat ditemukan dengan cara yang sama sebagaimana kita memperoleh pengetahuan. Sebagai tambahan, dalam aturan nominalisme, menjadi tidak bisa dipertahankan lagi bahwa di luar dunia yang tampak ini, ada domain nilai yang dengannya evaluasi kita terhubung secara misterius. (Bryant: 1985: 5)
Dalam aturan ketiga ini semakin tegas bahwa kita harus menolak asumsi nilai, karena nilai-nilai tidak dapat diperoleh dengan cara yang sama sebagaimana halnya pengetahuan yang kita miliki. Nilai ini kita peroleh melalui proses sosialisasi, jadi bersifat relatif, karena setiap kebudayaan dan masyarakat di mana proses tersebut berlangsung memiliki sistem nilainya sendiri-sendiri. Tanpa proses sosialisasi kita tidak akan memiliki nilai-nilai tersebut. Lain halnya dengan pengetahuan mengenai dunia empiris, walaupun tanpa sosialisasi, kita tetap dapat memperoleh pengetahuan tentang dunia, asalkan panca indra kita normal. (Subchi, 2001:392)
Dengan demikian, nilai dalam tradisi positivisme semakin tidak mendapat tempat, kalau tidak dianggap tidak ada. Bagi kaum positivis setiap orang harus menghilangkan muatan nilai-nilai, perasaan, harapan, dan juga kepentingannya agar pengetahuan yang diperoleh obyektif. Jadi nilai, dalam dirinya sendiri, adalah muatan

yang seharusnya tidak ada dalam pengetahuan. Jika nilai diakui, bukan saja membingungkan bagi keilmuan, tetapi juga meruntuhkan epistemologi keilmuan yang dibangun oleh positivisme itu sendiri. Sehingga, dalam aturan ketiga tentang positivisme ini diperjelas, bahwa nilai dianggap tidak ada, yang dipopulerkan oleh ilmuwan saat ini sebagai sains yang bebas nilai.

d. Keyakinan akan Kesatuan Esensial Metode Ilmu Pengetahuan (*Belief in the essential unity of the scientific method*)

Aturan keempat menurut Kolakowski yang menjadi ciri dari positivisme adalah keyakinan akan kesatuan esensial metode ilmu pengetahuan. Aturan ini menyatakan bahwa terdapat persamaan antara metode ilmu alam dengan metode ilmu sosial, sehingga metode yang terdapat dalam ilmu alam (*natural science*) bisa langsung diterapkan dalam ilmu sosial. Meskipun obyek penelitian kedua ilmu pengetahuan itu berbeda, namun hal itu tidak berarti bahwa prosedur penalaran dan penelitian di antara keduanya harus berbeda. Implikasi dari pandangan semacam ini adalah bahwa berbagai prosedur dan metode penalaran serta penelitian yang telah berkembang lebih dahulu dalam ilmu-ilmu alam dianggap dapat digunakan juga untuk memahami berbagai gejala sosial-budaya. (Imam Subchi, 2001:392)

Serangkaian atauran yang disodorkan Kolakowski ini memang dapat membantu kita memahami apa kira-kira yang dimaksud positivisme. Namun jika kerangka ini ingin kita terapkan untuk menelaah suatu pemikiran tertentu, maka kita masih akan mengalami kesulitan yang cukup serius, karena pandangan Kolakowski tidak terwujud dalam suatu cabang ilmu sosial-budaya. (Ahimsa-Putra, 1997: 30)

Selanjutnya, untuk lebih memahami positivisme, kita juga harus tahu *rule of positivism* yang berasal dari Perancis, tempat dimana Comte mengenalkan istilah ini. Bryant

(1985) mengidentifikasi tradisi positivisme yang berkembang di Perancis yang bisa dilihat dari 12 aturan berikut ini:

1. Hanya ada satu dunia, dan dia memiliki eksistensi obyektif

Comte menolak dunia yang tidak punya eksistensi, dalam arti ontologi atau metafisika. Tidak ada pembagian dunia fisik dan dunia metafisik. Menurutnya benar dunia itu terdiri dari struktur tunggal yang berdiri independen di luar konsep kita, persoalannya hanyalah bagaimana melihat lebih dekat dunia yang satu itu.

2. Komponen dunia, dan hukum yang mengatur pergerakannya, dapat ditemukan melalui sains saja, sains menjadi satu-satunya bentuk pengetahuan. Karena itu yang tidak bisa diketahui secara ilmiah, tidak dapat diketahui.

Pertanyaan filosofis seperti “Kenapa dunia itu ada?”, atau “Apakah takdir itu?”, atau “Bagaimana kehidupan setelah mati, (jika memang ada)?” bukan hanya tidak ilmiah, tetapi juga tidak bisa diketahui jawabannya. Comte menyebut perkara seperti itu seharusnya dibuang, bukan hanya dari ilmu (*science*), tetapi juga dari pengetahuan (*knowledge*).

3. Ilmu pengetahuan bergantung kepada penalaran dan observasi yang sepatutnya digabungkan.

Comte menyebut teori tanpa observasi seperti mistisisme, dan observasi tanpa teori hanyalah pengalaman belaka. Pengetahuan itu harus terdiri dari bukti (*proof*) yang didapat di lapangan, dan juga teori (*law*) sebagai hasil dari penalaran (*reason*).

4. Ilmu pengetahuan tidak bisa mengcover semua unsur-unsur pokok dari dunia, serta semua hukum yang mengaturnya, karena penalaran dan observasi manusia terbatas. Pengetahuan ilmiah selamanya bersifat relatif, mengikuti perkembangan

intelektual yang dicapai dan kemajuan organisasi sosial sains.

Comte menganggap hanya ada satu dunia obyektif, tetapi dia juga mengakui bahwa manusia mungkin juga mengetahui dunia yang kompleks dan tidak terbatas, dan itu berhubungan dengan kekuatan penalaran dan observasi lapangan.

5. Apa yang manusia upayakan untuk memahami dunia normalnya didorong oleh minat praktis dan situasi dirinya. Keinginan manusia untuk mengerti dunia terutama didorong untuk memuaskan nafsunya sendiri atau demi dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kepentingan praktis. Jadi dua motif itulah yang dianggap paling berperan untuk mendorong manusia untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan.
6. Ada hukum perkembangan sejarah, yang mampu menjelaskan masa lalu, memahami masa kini, dan memprediksi masa depan (Pola).
Bagi Comte, terdapat satu cabang sosiologi, yakni dinamika sosial, yang khusus mempelajari perubahan dan perkembangan sejarah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Salah satu hukumnya yang paling besar adalah kontinuitas sejarah (*historical progress*), dimana yang paling terkenal adalah tentang tiga tahap perkembangan pemikiran manusia, yakni tahap teologis, metafisik, dan tahap positif.
7. Ada hukum sosial yang mengatur interkoneksi antar lembaga dan bentuk kebudayaan yang berbeda (Sosial statis). Prinsip ini merupakan cabang dari ilmu sosiologi, yakni sosial statis, yang dikhususkan untuk membangun hukum kemiripan yang mengatur aksi dan reaksi dari bagian-bagian sistem sosial antara satu dengan yang lain. Singkatnya, sosial statis mempelajari fungsi elemen di dalam sistem sosial yang bersifat tetap alias given.

8. Masyarakat adalah kenyataan yang punya jenisnya sendiri (*sui generis*).

Masyarakat adalah kesatuan organik dimana karakter dan komponennya berhubungan dengan kombinasi-kombinasi yang menyusunnya. Dalam arti bahwa masyarakat tidak bisa dilihat hanya pada aspek individunya saja, atau lembaganya saja, tetapi keseluruhan baik individu maupun lembaga itulah masyarakat. Sebab itulah masyarakat di sebut *sui generis*, yakni entitas yang khusus yang tidak ada duanya.

9. Tataan sosial adalah kondisi alamiah masyarakat.

Comte yakin bahwa ada tataan alamiah di luar sana, begitu juga tataan masyarakat, kecuali dalam tahap transisi sosial yang berlangsung singkat. Dengan itu Comte yakin, dengan pendekatan positif, keharmonisan dalam masyarakat dapat dijaga, atau ditertibkan jika dia menjadi kacau. Karena tataan itu sendiri sifatnya alamiah dalam masyarakat. Tataan masyarakat juga merupakan kondisi yang diinginkan manusia, Bryant menyebutnya keinginan sejati (*true needs*). Imbas dari aturan ini adalah dimungkinkannya rekayasa sosial untuk mengembalikan ketaraturan masyarakat ketika ketaraturan itu hilang.

10. Moral dan pilihan politis harus dibentuk secara eksklusif berdasarkan nilai-nilai sains.

Saint-Simon dan Comte sama-sama berasumsi bahwa ada hubungan langsung antara keseragaman ide-ide dasar dan tataan sosial, dan keberagaman ide dengan kekacauan atau disorder. Saint-Simon mengatakan bahwa politik berdasar pada persoalan etis, serta institusi manusia tidak lain adalah aplikasi dari ide-ide. Comte lebih dahsyat lagi, dia mengatakan bahwa ide bisa membangun dunia, atau melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Mereka berdua menganggap penting ide, karenanya ide harus dibentuk dengan

gagasan positif atau saintifik sehingga tercipta tatanan dunia yang baik.

11. Penaklukan manusia di depan hukum-hukum alam dari sejarah dan masyarakat, menghalangi evaluasi bentuk institusional dan kultural, sehingga yang ada hanya kesesuaian dengan hukum-hukum ini. (Dogma-dogma dalam dunia sosial seharusnya dihilangkan.)

Comte meyakini bahwa kritik terhadap filsafat diperlukan. Dogma metafisik seperti kebebasan hati nurani, persamaan-kesamaan, kehendak bebas dari umat manusia, dan kemerdekaan nasional memainkan peranan penting dalam guncangan rezim yang telah lewat. Kebebasan hati nurani misalnya, mencerminkan negara telah ditinggalkan oleh penghancuran kebenaran lama sebelum kebenaran lain menggantikan tempatnya. Karena itu dogma absolut tidak perlu lagi dipertahankan matematis, jika itu hanya berdasarkan pada keadaan metafisik saja. Hukum-hukum seharusnya tidak membuat manusia mengalami penaklukan, sehingga menghalangi proses evolusi dan dinamika sosial menuju kualitas kehidupan yang lebih baik.

12. Yang positif dan konstruktif, menggantikan yang negatif dan kritis. Yang positif dan relatif juga menggantikan yang teologis dan metafisik, yang absolut. Prinsip ini merangkum semua yang telah dibebaskan sebelumnya, bahwa secara khusus semua itu relatif, kecuali semangat untuk menjadi positivis. Positiv di sini diartikan sebagai sesuatu yang “pasti” atau sudah “terdefiniskan”. (Bryant, 1985: 12-22)

Dua belas aturan yang sudah disebutkan di atas merupakan dua belas prinsip penting yang menjadi panduan kaum positivis Perancis. Dua belas aturan ini juga menjadi ciri dari positivisme Perancis, sebuah aliran paling awal dalam tradisi positivisme itu sendiri. Untuk memahami positivisme dalam

bentuk asalnya di Perancis, tidak boleh tidak kedua belas aturan itu adalah yang paling penting untuk dipahami.

Akar Positivisme: Rasionalisme dan Empirisme

Comte bercita-cita untuk menemukan kuantifikasi atau hukum-hukum seperti yang terdapat dalam ilmu alam. Bukan hanya bercita-cita, tetapi Comte juga yakin bahwa setiap fenomena yang ada, baik fenomena sosial maupun fenomena alam, memiliki hukum-hukum, dan tugas ilmuwanlah untuk menemukan hukum-hukum itu menggunakan observasi dan penelitian mendalam, dengan penalaran dan eksperimen yang digabungkan. Comte begitu yakin hanya ada satu cara berpikir (epistemologi) untuk menjelaskan fenomena sosial, dimana cara itu telah berhasil menjelaskan dunia fisik (ilmu alam), yakni positivisme. Alternatif lain selain epistemologi positivisme tidak dimungkinkan.

Lingkaran Wina (*Viena Circle*), di sisi lain, juga mendukung pemikiran positivis Comte. Pamflet tahun 1929, yang dirancang oleh orang-orang Lingkaran Wina seperti Neurath, dan diedit oleh Hann dan Carnap, cukup jelas menggambarkan proyek besar Lingkaran Wina. Pamflet itu berbunyi: *The scientific world-conception knows only empirical statements about things of all kinds, and analytical statements of logic and mathematics*. Konsepsi tentang dunia yang bersifat saintifik hanya mengenal pernyataan empiris tentang segala sesuatu, dan juga pernyataan analitis yang bersifat logis dan matematis. Di luar itu berarti tidak ilmiah. (Bryant, 1985: 111)

Setidaknya ada dua karakteristik dari pernyataan di atas, *pertama*, diakuinya empirisme dan positivisme sebagai dasar pengetahuan yang sah. Dan yang kedua, konsepsi dunia ilmiah itu menuntut metode yang pasti, yakni analisis logis. Proyek besar Lingkaran Wina tidak lain adalah untuk menyerang filsafat spekulatif yang tidak sejalan dengan mereka. Metafisika termasuk sasaran kelompok ini, dimana metafisika

mereka sebut sebagai *meaningless*, karena sekalipun logis, tetapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya melalui observasi. (Bryant, 1985: 112)

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa positivisme memiliki akar epistemologis dari empirisisme, disamping tentu saja rasionalisme. Empirisisme itu sendiri menguat ketika seorang pemikir Inggris, John Locke (1632-1704), mulai memperkenalkan teorinya. Bahkan Locke bisa dianggap sebagai pendiri empirisisme itu sendiri, yakni paham yang menyebutkan bahwa semua pengetahuan kita, (dengan kemungkinan pengecualian logika dan matematika) berasal dari pengalaman. Dalam bukunya yang terkenal, *Essay Concerning Human Understanding* (1687), John Locke mengemukakan tidak ada ide yang dibawa (ide bawaan) sejak lahir. Ide didapat dari pengalaman. Bahkan imajinasi dan informasi yang ada merupakan akumulasi pengalaman manusia. Locke menulis:

“Selanjutnya mari kita memandang pikiran, seperti kita tahu, sebagai kertas putih, yang bebas dari semua sifat, tanpa ide apapun; lantas bagaimana pikiran dilengkapi? Darimana datangnya simpanan yang banyak sekali, khayalan manusia yang amat banyak dan tak terbatas telah melukisnya dengan aneka ragam yang tiada akhir? Atas pernyataan ini, saya menjawab dalam satu kata; dari pengalaman.” (Buku II, bab I, bagian 2)

Menurut Bertrand Russell—mengomentari gagasan empirisisme Locke—ide-ide berasal dari dua sumber, (a) indera, dan (b) persepsi hasil kerja pikiran, yang disebut ‘*indera internal*’. Karena kita hanya dapat berpikir dengan ide-ide, dan karena semua ini berasal dari pengalaman, nyatalah bahwa tidak ada pengetahuan yang mendahului pengalaman. (Russell, 2007: 799-800). Saya contohkan di sini bahwa kita tidak akan tahu pedasnya lada, misalnya, jika kita tidak pernah makan lada sebelumnya.

Comte juga mendukung gagasan ini. Comte menulis dalam bukunya, *Positive Philosophy* (1858), *“Reasoning and observation,*

duly combined, are the means of this knowledge...” (Comte, 1858: 33). Dua sarana itulah, yang digabungkan, yang menurut Comte penting untuk memperoleh pengetahuan di era *positive state*, karena keduanya merupakan dasar yang paling penting untuk membentuk pengetahuan positif itu sendiri. Dalam kutipan yang lain Comte mengatakan, *theory without observation as ‘mysticism’ and observation without theory as ‘empiricism.’* (Bryant, 1985: 14). Positivisme, dengan demikian, menolak penjelasan dari satu pihak saja. Baik pengalaman semata, maupun teori semata.

Ilmu Pengetahuan dalam Kacamata Positivisme

Dari aturan positivisme yang diuraikan di atas, positivisme tampak menjadi menjadi batas sains itu sendiri. Seolah-olah yang tidak dapat dicapai oleh positivisme, juga tidak dapat dicapai oleh manusia. Keyakinan bahwa terdapat kesatuan sains, baik ilmu alam (*natural science*) atau ilmu sosial (*social science*), menggambarkan suatu unifikasi dimana tidak ada perbedaan esensial antara metode ilmu alam dan ilmu sosial, antara manusia, masyarakat dan alam.

Karena itu proyek mendasar positivisme adalah mencari kebenaran metode tunggal dalam ilmu pengetahuan. Satu kacamata tunggal untuk memandang dunia yang dianggap satu. Positivisme mengakui bahwa ilmu itu satu, yang benar, yang otoritatif, dan tidak ada di luar ilmu pengetahuan metode yang dapat menjelaskan dunia, baik dunia alam maupun dunia sosial. Positivisme menolak pembagian wilayah ilmu pengetahuan seperti yang dijabarkan W. Dilthey, yang membedakan *naturewissenschaften* (ilmu-ilmu alam) dan *geisteswissenschaften* (ilmu-ilmu budaya). (Hardiman, 2003: 22)

Jika di Perancis Saint Simon dan muridnya, Comte, menjadi referensi, di Jerman referensi aliran positivisme adalah Von Feuerbach. Positivisme, dengan pengaruh dari empirisisme dan evolusionisme, telah menempatkan ilmu-ilmu alam sebagai kekuatan dalam memperkuat cita-cita untuk

menguasai hukum-hukum perkembangan. Menurut Feuerbach, hukum-hukum perkembangan ilmu alam adalah satu-satunya asas yang seharusnya diterapkan dalam perkembangan kehidupan sosial manusia, untuk menemukan hukum-hukum yang obyektif di balik fenomena sosial. Kultur positivisme telah mendorong ilmu pengetahuan menjadi penuh “kepastian”, seperti halnya ilmu alam (Watloly, 2001: 80)

Implikasi konsepsi-dunia yang diusung oleh kaum positivis juga berimbas ketika mereka memandang realitas sosial (manusia) dan ilmu pengetahuan. Kaum positivis memandang manusia sebagai individu rasional yang diatur oleh hukum-hukum sosial, perilakunya dapat dipelajari melalui pengamatan dan diatur oleh sebab-sebab eksternal yang menghasilkan hasil yang sama (penyebab dan perilaku yang sama menghasilkan konsekuensi atau hasil yang sama). (Subchi, 2001:396)

Bagi kaum positivis, ilmu pengetahuan sosial juga bekerja menurut hukum-hukum yang tunduk pada pengujian dan verifikasi sebagaimana yang terdapat dalam ilmu alam. Jika sebuah hukum ditemukan, maka itu harus dibakukan dan mencakup semua obyek yang terdapat di dalamnya. Jika tidak dapat dibakukan dan tidak berlaku general, maka hukum itu belum layak disebut hukum. Ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut kaum positivis adalah sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang ketat, berbeda dari sekedar spekulasi akal sehat. Artinya ilmu pengetahuan harus didasarkan pada metode yang jelas dan teruji, sehingga setiap hasil temuan bisa diuji atau dibuktikan oleh siapapun, bukan klaim peneliti saja.
- b. Ilmu pengetahuan menurut positivis bersifat deduktif, berasal dari yang abstrak dan umum menuju yang konkrit dan spesifik. Bukan sebaliknya, menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat

husus, sehingga tidak teruji sebagai hukum yang umum.

- c. Bersifat nomotetis, bersandar pada hukum-hukum kausal yang digunakan untuk menerangkan kejadian-kejadian yang konkrit dan hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya. Dalam arti selalu berusaha menemukan pola tetap yang selalu ada dalam setiap gejala, sampai pola ini layak disebut sebagai hukum.
- d. Berdasarkan pada kombinasi antara eksperimen dan rasionalisasi. Artinya tidak berangkat dari abstraksi semata, atau sekedar pengalaman saja. Keduanya harus digabungkan sehingga pernyataan yang dibuat merujuk secara jelas terhadap fakta empiris. (Irianto, 1997: 51).
- e. Bebas nilai (*value free*), tidak tergantung kepada peneliti. Penelitipun harus obyektif dan bebas nilai. Peneliti menurut positivis adalah orang-orang yang berdiri di luar segala nilai dan kepentingan, di luar pandangan politik, latar belakang kultural, status sosial, atau ketertarikan yang bersifat pribadi. Tujuan peneliti atau saintis hanya untuk menemukan kebenaran dalam dunia. (Holm, 2013: 78)

Ciri-ciri pengetahuan di atas adalah *pattern* kaum positivis dalam memandang ilmu pengetahuan, memandang manusia atau peneliti, dan juga memandang dunia sebagai obyek pengetahuan itu sendiri. Sampai di sini harus diakui positivisme telah banyak melahirkan hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan budaya, seperti stratifikasi sosial, evolusi sosial, dan lain sebagainya. Metode positivis yang rigid dan terkadang kuantitatif mewujud dalam statistik-statistik, hukum-hukum yang berlaku general, yang sampai saat ini sangat banyak kita temukan. Tidak diragukan lagi epistemologi positivisme sangat dominan di zaman modern ini. Bahkan modern itu sendiri jiwanya adalah positivisme.

Fenomenologi: Pengetahuan yang Mendalam tentang Dunia

Fenomenologi adalah tanggapan yang sempurna terhadap positivisme, dengan paradigma berpikir dan pendekatan yang berbeda dalam mengkonsepsikan realitas. Fenomenologi menyediakan (*provide*) metode bagi para ilmuwan untuk melihat, mengkonsepsikan, serta menjelaskan dunia, baik manusia sebagai subyek, dan fenomena alam dan sosial sebagai obyek secara lebih mendalam. Jika positivisme dianggap sebagai epistemologi paling dominan dalam ilmu pengetahuan di masa modern, maka fenomenologi menjadi penting untuk kebangkitan (*revival*) ilmu pengetahuan yang lebih “manusiawi.” Dalam bahasa Valeria Malhotra Bentz, *phenomenology is not an alternative scientific methodology but is rather a deeper level of knowing* (Bentz, 1995: 45). Fenomenologi tidak berprentensi untuk menjadi metodologi saintifik alternatif dari positivisme, tetapi sebuah pengetahuan yang lebih mendalam tentang dunia itu sendiri.

Untuk menjelaskan tentang fenomenologi, mari kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu. Fenomenologi berasal dari kata *phenomenon*, yang berarti menunjukkan diri (*to show self*). Istilah ini sudah ada sejak tahun 1765, khususnya dalam karya-karya filsafat Immanuel Kant. Dalam wacana itu makna fenomenologi belum dirumuskan secara khusus dan eksplisit. (Ahimsa-Putra, 2012: 273)

Barulah Hegel—walaupun belum sepenuhnya jelas—mencoba memberi arti terhadap diskursus tersebut dengan memaknai fenomenologi sebagai ‘pengetahuan sebagaimana nampak dalam kesadaran’. Pengetahuan di sini maksudnya adalah apa yang dipersepsikan, apa yang dirasa dan diketahui melalui kesadaran dan pengalaman. (Raco, 2010: 81).

Fenomenologi menemukan bentuknya yang semakin jelas setelah dikembangkan oleh Edmund Husserl (1859-1938), seorang filosof Jerman. Husserl pada dasarnya berupaya

menemukan dasar bagi sebuah filsafat yang membahas, dan menelaah kenyataan. Dasar ini, menurut Husserl, hanya dapat ditemukan dalam kenyataan itu sendiri atau sesuatu itu sendiri (*things in themselves*). Dasar dari filsafat adalah kenyataan itu sendiri, kenyataan sebagaimana dia menampilkan dirinya, sebagaimana dia menghadirkan dirinya. Husserl melanjutkan bahwa yang dimaksudkannya dengan “sesuatu itu sendiri” (*the thing itself*) tidak lain adalah “kesadaran” (*consciousness*). Oleh karena itu, fenomenologi yang dibangun oleh Husserl dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesadaran. (Ahimsa-Putra, 2012: 274)

Proyek Besar Fenomenologi

Kemunculan fenomenologi dilatarbelakangi oleh kenyataan terjadinya krisis ilmu pengetahuan. Dalam krisis ini, ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan nasihat apa-apa bagi manusia. Ilmu pengetahuan senjang dari praktik hidup sehari-hari. Hal ini, menurut Husserl, karena konsep teori sejati telah banyak dilupakan oleh banyak disiplin yang maju dalam kebudayaan ilmiah dewasa ini. Sehubungan dengan itu, Husserl mengajukan kritik terhadap ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. Ilmu pengetahuan telah jatuh pada objektivisme, yaitu cara memandang dunia sebagai susunan fakta objektif dengan kaitan-kaitan niscaya. Bagi Husserl, pengetahuan seperti itu berasal dari pengetahuan ilmiah yang ditujukan bagi kehidupan sehari-hari, yang disebut *lebenswelt* atau *lifeworld*. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam, setiap orang harus menunda (*epoche*) pengetahuan ilmiahnya terlebih dahulu.
- b. Kesadaran manusia atau subjek ditelan oleh tafsiran-tafsiran objektif semu, karena ilmu pengetahuan samasekali tidak membersihkan diri dari kepentingan-kepentingan dunia kehidupan sehari-hari. (Hasbiansyah, 2008:164)

- c. Ilmu pengetahuan yang cenderung positivis-naturalis menghapus aspek makna dalam diri manusia, karena memandang manusia hanya dari aspek luarnya saja. Manusia dianggap bagian dari alam, yang tunduk kepada hukum-hukum tertentu. (Hardiman, 2007: 38)

Dengan demikian, menurut Husserl, krisis ilmu pengetahuan itu disebabkan oleh kesalahpahaman disiplin-disiplin ilmiah sendiri terhadap konsep teori sejati itu. Melalui fenomenologi, Husserl berusaha menemukan hubungan antara teori dengan dunia kehidupan yang dihayati (*labenswelt*). *Labenswelt* sendiri diartikan sebagai sebuah dunia yang bebas dari konsep-konsep, dunia pra-ilmiah, sebuah dunia nontematis. Tetapi dunia itu kini telah tiada, ditimbun oleh konsep-konsep ilmiah tentangnya, yang justru menghilangkan makna kesejatiannya. Untuk menemukan kembali dunia yang lenyap ini, Husserl menempuh jalan reduksi, yaitu dengan menempatkannya di antara dua tanda kurung (*epoche*). Apa yang disebut sebagai reduksi fenomenologis itu cocok dengan semboyan Husserl sendiri yang sekarang masyhur, *zuruck zu den sachen selbst* (Kembali pada benda-benda itu sendiri). Dengan kata lain, dunia yang hilang ditemukan kembali dengan intuisi atau kesadaran langsung yang menangkap dunia itu. (Hardiman, 2007: 39-40)

Karena itu kesadaran sangat penting dalam fenomenologi. Lebih lanjut Husserl mengatakan bahwa kesadaran selalu meminta obyek, yaitu kesadaran-terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa obyek di luar kesadaran, seperti kesadaran akan benda-benda, peristiwa, atau fenomena. Selain itu, kesadaran tentang kesadaran itu sendiri. Sampai di sini Husserl mengikuti pemikiran Descartes, seorang filosof yang disebut-sebut sebagai bapak filsafat modern. Adagium yang terkenal dari Descartes berbunyi, "Cogito Ergo Sum," yang artinya "aku berpikir, maka aku ada." (Ahimsa-Putra, 2012: 274)

"Aku ada" merupakan konsekuensi laten dari aku yang berpikir. Kita menyadari hal

itu ada, karena kita berpikir tentang sesuatu itu sendiri. Contoh klasik tentang hal ini adalah saat seseorang menyadari detak jarum jam di dinding. Detak jam di dinding benar-benar dirasakan ketika seseorang ingin mendengarkannya, dalam arti memfokuskan pikiran tentangnya. Berbeda dengan orang yang pikirannya tidak diarahkan (*intension*) untuk mendengarkan detak jarum di dinding yang sangat pelan, bisa tidak disadari dan tidak tampak dalam pikiran, sehingga bagi subyek, tidak diketahui apakah jam dinding itu berdetak atau tidak.

Dari contoh tersebut kita bisa membagi dua anasir dalam hubungannya dengan kesadaran, yaitu (a) subyek yang memiliki kesadaran itu (*noesis*), dan (b) obyek dari kesadaran tersebut (*noema*). Antara anasir yang pertama dan yang kedua berhubungan secara simultan, tidak terpisahkan. Ketika yang pertama ada, maka yang kedua juga ada. Tetapi jika hanya ada obyek, dalam arti hanya ada yang kedua, belum tentu ada yang pertama. Dan ini tidak ada artinya bagi manusia. Misalnya, katakanlah, di sebuah hutan ada Dinosaurus, tetapi tidak ada satupun manusia yang menyadarinya, dalam arti tidak ada satu orangpun yang pernah melihatnya, maka itu tidak ada artinya bagi manusia. Sama dengan tidak ada.

Husserl ingin menyatakan bahwa apa yang menampakkan diri bagi kesadaran, yaitu fenomena, adalah kenyataan yang menampakkan diri. Apa yang menampakkan diri itu bukanlah penafsiran atau persepsi belaka atas kenyataan, sementara kenyataannya sendiri tetap menjadi "Mister X" yang tidak dikenal, melainkan kenyataan itu sendiri yang tampak. Menyatakan bahwa kesadaran bersifat intensional sama artinya dengan menyatakan bahwa "kenyataan menampakkan diri." (Hardiman, 2007: 40)

Dalam fenomenologi, yang memiliki kesadaran niscaya menjadi pusat dari dunia, dan hanya manusia isi dari dunia ini yang punya kesadaran, sehingga manusia menjadi pusat dari dunia. Apakah fenomenologi suatu

epistemologi yang sangat subyektif? Terhadap pernyataan ini kita harus berasumsi bahwa setiap manusia memiliki kesadaran, dalam arti bahwa di dunia ini terdiri banyak subyek alias banyak kesadaran. Terdapat kesadaran yang saling berinteraksi antara subyek yang satu dengan subyek yang lain.

Pengalaman pribadi dalam 'dunia' tersebut beserta pengalaman orang-orang lain merupakan pengalaman bersama, anggapan ini lahir dari keberadaan bersama di dunia, sehingga memunculkan pengalaman yang kurang lebih sama (*ko-eksistensi*). Anggapan ini sekaligus juga menjadi asumsi dasar fenomenologi. Proses kebersamaan ini dapat terjadi karena dalam memandang suatu gejala, entah itu benda atau peristiwa, manusia selalu beranggapan bahwa gejala-gejala tersebut dialami atau bisa dialami oleh orang lain sebagaimana dia mengalaminya.

Manusia selalu mengira bahwa objek-objek atau peristiwa-peristiwa tersebut bagi orang lain adalah sama halnya dengan gejala-gejala tersebut bagi dia. Dengan kata lain dia beranggapan bahwa makna yang diberikannya pada gejala itu sama dengan makna yang diberikan oleh orang lain (*shared meaning*). Inilah yang dimaksud dengan intersubjektivitas dunia kehidupan. (Ahimsa-Putra, 2012: 275). Pemikiran mengenai intersubjektivitas ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Alfred Schutz, seorang sosiolog sekaligus murid Husserl sendiri.²

Contoh misalnya ketika satu orang melihat wanita cantik, dan orang tersebut memang cantik, sebagaimana disepakati masyarakat di suatu lokasi tertentu, maka orang-orang di situ akan bilang cantik. Cantik di sini tidak bersifat absolut atau obyektif, juga tidak subyektif, tetapi intersubjektif. Karena orang itu orang sering bilang, "cantik itu relatif."

Konsep-konsep dalam Fenomenologi

²Mengenai gagasan Schutz ini lihat lebih lanjut dalam artikel Heddy Shri Ahimsa-Putra, Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama, dalam Jurnal IAIN Wali Songo, vol. 20. No. 2. 2012.

Untuk lebih menambah pengetahuan kita tentang fenomenologi, ada baiknya penulis merinci konsep-konsep yang penting dalam tradisi fenomenologi itu sendiri. Beberapa konsep kunci ingin penulis jelaskan di sini untuk mencapai maksud tersebut. Adapun beberapa konsep kunci tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran

Aspek terpenting pertama dari fenomenologi adalah kesadaran itu sendiri (*consciousness*). Seperti yang dijelaskan di awal, kesadaran adalah "Aku yang Berpikir" dalam konsepsi Descartes. Kesadaran ini hanya dimiliki manusia, subyek yang berpikir, dimana kesadaran ini juga menuntut hal lain, yakni intensi. Intensi atau keterarahan ditujukan untuk sesuatu, yakni obyek, dimana dalam tradisi fenomenologi disebut "fenomena." Jika kesadaran ini mengarah kepada dirinya sendiri, disebut sebagai kesadaran murni, dalam istilah Descartes, *cogito tertutup*.

Schrag dalam bukunya *Radical Reflection and the Origin of the Social Sciences* (1980), sebagaimana dikutip oleh Bentz (1995), menyebut kesadaran ini bukan kesadaran biasa, tetapi sebuah kesadaran asal atau "the origin." Bentz menulis:

Origin is a place in the psyche which is not at all similar to logical grounding, but reaches beneath/beyond this point. This place is the inner well spring of poetry, music, science where there is no contradiction between intuition and judgement. It is what Schrag (1980: 69) refers to as the place of the "origin" of the human sciences. (Bentz, 1995: 45)

The origin adalah tempat dalam jiwa seseorang yang tidak sama dengan landasan logis, tetapi melebihi titik tersebut. Tempat ini merupakan asal atau mata air dari puisi, musik dan ilmu, dimana tidak ada kontradiksi antara intuisi dan penilaian. Inilah yang oleh Schrag disebut sumber ilmu pengetahuan manusia. Karena ini pula fenomenologi kemudian disebut sebagai *deeper level of*

knowing, pengetahuan yang mendalam tentang dunia.

b. Fenomena

Fenomena adalah konsep kunci dalam fenomenologi, karena epistemologi ini diambil dari asal katanya, yaitu *phenomenon*. Secara etimologis, istilah *fenomena* berasal dari kata *phai-normai* yang berarti menampakkan diri. Dari kata *phai-normai* menjadi kata fenomena yang berarti penampakan gejala. (Soekarno, 2005: 258). Fenomena adalah obyek dari persepsi, apa yang diamati. Fenomena juga pengalaman inderawi, sesuatu yang tampak ke dalam panca indra. (Smith & Raeper, 2000: 196) Jika ada orang yang mengatakan melihat fenomena Tuhan, hal itu tidak diterima karena Tuhan tidak tampak dalam panca indra. Tetapi perilaku orang yang melihat Tuhanlah yang tampak.

c. Memahami

Memahami dalam konteks fenomenologi menjadi konsep kunci. Memahami (*verstehen*) di sini tidak sama dengan menjelaskan (*enklaren*). Memahami dalam konteks fenomenologi berarti mengetahui pandangan-pandangan, norma-norma, nilai-nilai, atau aturan yang ada dalam sebuah masyarakat, atau yang dianut oleh individu. (Ahimsa-Putra, 2012: 285). Memahami menjadi ciri dasar dalam membedah alam pengetahuan manusia, dan karena itu memahami juga bagian dari metode. Konsep memahami sangat membantu dalam mengungkap realitas kebenaran dari kegiatan-kegiatan yang khas manusiawi dalam konteksnya yang eksistensial. (Wathloly, 2001: 118) Memahami juga tidak sama dengan menilai (*to judge*), justru dalam fenomenologi, penilaian harus ditunda (*suspension of justice*) untuk terus membuka kesempatan terhadap lahirnya makna-makna baru. Tidak seperti positivisme yang langsung membuat generalisasi atas pemahaman yang didapat, dalam fenomenologi hal itu tidak dilakukan karena kesejatan

keilmuan lahir dari pengalaman, dan pengalaman ini berlangsung terus-menerus.

d. Intensionalitas

Keterarahan (*intensionality*) dapat dipahami dalam hubungannya dengan kesadaran (*consciousness*). Kesadaran akan sesuatu hanya mungkin terjadi karena adanya keterarahan atau intensionalitas pada sesuatu tersebut. Sejauh kita memiliki kesadaran akan sesuatu hal atau peristiwa tertentu, dalam arti fenomena, maka kita akan membentuk kesadaran akan hal itu, dan dari sana kemudian timbul pemahaman.

Kita bisa melihat di sini hubungan yang penting antara kesadaran, intensionalitas, fenomena, dan pemahaman. Hubungan ini merupakan hubungan logis dan sinergis. Jadi, dalam fenomenologi, ketiga hal ini, yaitu kesadaran, intensionalitas, fenomena, pemahaman, menjadi hal yang niscara bagi setiap manusia dalam hubungannya dengan realitas di sekitarnya. Tetapi fenomenologi tidak hanya berhenti di situ. Satu konsep penting yang perlu diuraikan juga di sini adalah konsep tentang *epoche*, atau *bracketting*. Intensionaliti adalah sifat hakiki dari kesadaran. (Bakker, 1995: 23)

e. Epoche

Epoche bisa diartikan “tanda kurung”, atau “melepaskan keterhubungan.” Epoche kerap diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan istilah *bracketing*, yaitu “menyekat” antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam fenomenologi, *bracketing* ini kerap diartikan sebagai penundaan penilaian atau *suspension of judgment*, dari fenomena yang kita teliti, atau disebut juga sebagai reduksi fenomenologis. Husserl menekankan bahwa untuk memahami dunia, kita harus melepaskan semua konsep, praduga, tendensi dan pretensi, sehingga menunda dulu setiap penilaian yang ada, agar fenomena tersebut tampil sebagaimana

adanya, “sachen selbst,” *to the things themselves*, atau “hal pada dirinya.” Kita harus kembali kepada gejala, sebagaimana tampak, sebagaimana dia eksis. Hal ini tidak berarti bahwa praduga atau konsep-konsep kita tentang gejala itu salah, tetapi lebih kepada mengurungkan konsep tersebut atau memasukkan sementara dalam tanda kurung (*bracketing*). (Raco, 2010: 42).

Ilmu Pengetahuan Menurut Fenomenologi

Pada akhirnya, intisari fenomenologi terdiri dari setidaknya tiga hal, seperti dikemukakan Stanley Deetz (dalam Littlejohn dan Foss, 2005:38). *Pertama*, pengetahuan adalah hal yang disadari. Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman tetapi ditemukan langsung dalam pengalaman kesadaran. *Kedua*, makna dari sesuatu terdiri dari potensi-potensi dalam kehidupan seseorang. Bagaimana hubungan seseorang dengan suatu objek akan menentukan bagaimana makna objek itu bagi yang bersangkutan. *Ketiga*, bahasa merupakan sarana bagi munculnya makna. Kita mengalami dunia dan mengekspresikannya melalui bahasa. (Hasbiansyah, 2008: 167)

Pada intinya, fenomenologi bermaksud bukan untuk menuliskan semua pengetahuan menjadi hukum-hukum, tetapi bercita-cita agar bagaimana pengetahuan itu didapat dengan cara yang paling murni, sebagai sesuatu yang tampil “polos” apa adanya dalam kesadaran. Kenyataan adalah apa yang tampil dalam kesadaran itu sendiri, sebagaimana adanya, tanpa direcoki oleh prasangka atau penilaian yang mereduksi kenyataan itu sendiri.

Namun tidak mungkin kita mengetahui kenyataan tanpa memberi suatu klasifikasi, kategorisasi, atau menurut istilah Alfred Schutz, *typification*. Alfred Schutz (1970) menulis:

The world, the physical as well as the sociocultural one, is experienced from the outside in terms of types: there are mountains, trees, birds, fishes, dogs, and among them Irish setters . . . they belong

to the prepredicative thinking. The vocabulary and the syntax of the vernacular of everyday language represent the epitome of the typifications socially approved by the linguistic group. (Bentz, 1995: 41)

Dunia, baik fisik maupun sosial-budaya, dialami dari sejumlah tipe-tipe di luarnya: gunung, pepohonan, burung, ikan, anjing dan juga orang-orang. Mereka termasuk dalam pemikiran predikatif. Kosakata dan sintak dari bahasa sehari-hari merupakan ciri khas tipifikasi yang disetujui secara sosial oleh kelompok linguistik.

Dengan demikian, fenomenologi berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu, pengetahuan yang sesuai dengan representasi dalam kesadaran. Namun pengetahuan yang tampil polos itu bukan berarti bebas dari klasifikasi, kategori ataupun tipifikasi seperti yang diperkenalkan Schutz. Ini bukan mereduksi fenomenologi menjadi tipifikasi, tetapi menggambarkan cakupan usaha fenomenologi untuk mendeskripsikan, memaparkan fenomena yang tampil dalam kesadaran dan menunjukkan bagaimana kesadaran itu terbangun. (Ahimsa-Putra, 2012: 276). Dan dalam usaha itu, kita tidak mungkin lepas dari kategorisasi dan tipifikasi.

Positivisme dan Fenomenologi: Sebuah Kritik Epistemologi

Positivisme dan fenomenologi, sebagai sebuah epistemologi, menjadi penting artinya bagi keilmuan modern. Keduanya menyediakan perangkat atau kerangka berpikir (*frame work*) yang penting untuk menjelaskan dunia, dengan metodologi dan struktur yang berbeda satu sama lain.

Seperti yang telah diuraikan, kedua epistemologi ini berangkat dari paradigma yang berbeda. Jika positivisme berasumsi realitas adalah tunggal, maka fenomenologi berasumsi bahwa realitas adalah unik. Jika positivisme percaya terdapat makna yang umum, yaitu hukum, dalam setiap realitas, yang bisa ditemukan lewat pengamatan langsung atau observasi, fenomenologi

percaya bahwa makna tercipta akibat interaksi subyek yang ada dalam dunia (koeksistensi).

Positivisme telah berhasil membangun sebuah kerangka berpikir yang dominan dalam beberapa dekade terakhir, dan dalam perjalanan panjangnya telah banyak memperoleh ilmuwan pendukung yang menyokong epistemologi ini. Tetapi sekalipun menjadi epistemologi dominan, bukan berarti tidak ada kelemahan di dalamnya. Sama halnya dengan fenomenologi, walaupun dimaksudkan untuk mengembalikan sains, khususnya dalam ruang lingkup sosial-budaya, menjadi lebih manusiawi, bukan berarti bebas dari kritik. Berikut ini penulis sajikan kritik terhadap dua epistemologi tersebut.

Kritik terhadap Positivisme

Penyokong Teori Kritis (*critical theory*) dari Mazhab Frankfurt, adalah sekelompok cendekiawan yang tercatat paling sengit mengkritik positivisme. Di antara mereka ada tokoh-tokoh seperti Horkheimer, Adorno dan Marcuse, yang menunjukkan bahwa positivisme bermasalah, karena pandangan tentang penerapan metode ilmu-ilmu alam pada ilmu-ilmu sosial tidak lain merupakan saintisme dan ideologi. Dengan pandangan seperti dijelaskan di atas, dimana sains dipandang netral, obyektif, bebas nilai, dan seterusnya, positivisme melestarikan *status quo* konfigurasi masyarakat yang ada. Sehingga pengetahuan yang dihasilkan tidak merubah apa-apa, hanya salinan dari fakta sosial yang ada, sekadar *copy paste* dari realitas. Dalam arti, pemahaman yang diperoleh dengan epistemologi ini tidak lain hanya kuantifikasi dari fakta sosial. Jika temuan ini dipakai untuk rekayasa-sosial misalnya, hal itu tidak lebih dari memperlakukan masyarakat atau realitas-sosial sebagaimana memperlakukan fakta-fakta teknis alamiah. (Hardiman, 2003: 24).

Dengan bahasa lain, positivisme dalam ilmu sosial tidak lebih dari sekedar mekanisasi fakta sosial, mekanisasi obyek sosial-budaya,

dan karena itu juga mekanisasi masyarakat, mekanisasi manusia. Mekanisasi ini tidak lain dari bentuk dehumanisasi. Oleh Husserl hal ini disebut sebagai krisis keilmuan modern. Husserl mengatakan, *the "crisis" of the sciences is the loss of meaning for life.* (Bentz, 1995: 41)

Menurut Husserl ilmu pengetahuan telah berkembang menjadi obyektivisme semu, yaitu sebagai cara berpikir yang memandang dunia sebagai susunan fakta-fakta obyektif belaka beserta keterkaitannya yang niscaya. Subyek atau kesadaran manusia ditafsirkan dengan cara yang melulu obyektivistis. Padahal tidak ada subyek yang dalam ilmu pengetahuan yang murni obyektif dan bebas nilai. (Ulumuddin, 2006:83) Positivisme cenderung mereifikasi dunia sosial dan melihatnya sebagai proses netral. Positivisme mengabaikan subyek atau aktor dan mengkerdilkannya menjadi entitas pasif yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan alam. (Halim, 2017: 50).

Kritik lebih lanjut kemudian dikemukakan oleh Habermas seputar epistemologi keilmuan yang berkembang. Meskipun Jurgen Habermas sepakat dengan Husserl dalam kritiknya terhadap positivisme, tetapi elaborasi lebih jauh dilakukan olehnya dengan mendasarkan diri pada keilmuan kritis yang diusungnya. Pertama-tama, Habermas membagi kepentingan keilmuan yang menurutnya terdiri dari tiga, yakni:

- 1) Ilmu empiris-analitis atau ilmu-ilmu alam. Cakupan ilmu ini bergerak di wilayah kepentingan, untuk menguasai hal-hal yang bersifat obyektif. Sistem acuan dalam bidang ilmu ini adalah penguasaan teknis.
- 2) Ilmu historis-hermeneutics, yakni ilmu sosial-budaya, yang berusaha memahami makna (*sinnverstehen*), dan bukan menjelaskan (*erklaren*), fakta yang diobservasi. Dalam wilayah ilmu ini peneliti juga menjadi penafsir, yang bertugas mengkomunikasikan makna dari realitas yang diteliti. Pada wilayah ini sistem acuannya adalah kepentingan

praktis untuk mencapai pengertian dan konsensus atau intersubjektifitas.

- 3) Ilmu-ilmu kritis. Bidang ini merupakan usaha lebih lanjut terhadap apa yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial dalam menjelaskan berbagai tingkah laku sosial. Ilmu-ilmu kritis ini juga berfungsi untuk mengkritisi perkembangan epistemologi positivisme yang banyak ditemukan dalam ilmu-ilmu sosial. Epistemologi positivisi cenderung memandang realitas sosial sebagai keajaiban- keajaiban sebagaimana ilmu-ilmu alam. Lebih dari usaha tersebut, ilmu-ilmu kritis berusaha menunjukkan bahwa keajaiban-keajaiban tertentu yang merupakan pola hubungan ketergantungan ideologis pada dasarnya dapat diubah. Apa yang dianggap sebagai "hukum-hukum" "yang mengatur proses sosial itu, oleh Habermas dianggap sudah tidak berlaku. (Ulumuddin, 2006:85)

Kritik terhadap Fenomenologi

Fenomenologi bertujuan untuk menemukan makna kehidupan, makna dari *lebenswelt*, *lifeworld*, atau dunia kehidupan sehari-hari. Dalam usaha ini fenomenologi meletakkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran-tentang (*intensity of consciousness*), yang menyadari dunia sekitarnya dengan kesadaran tertentu. Makna dunia ini tidak untuk dijadikan hukum-hukum, apalagi untuk menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Fenomenologi, dengan demikian, juga ilmu tentang mengungkap makna kenyataan yang hadir dalam kesadaran. Sekalipun demikian, bukan berarti fenomenologi bebas dari kritik. Dibalik kelebihanannya yang selalu berorientasi kepada kemurnian, tanpa distorsi terhadap realitas, fenomenologi menyimpan sejumlah kerumitan, khususnya dari aspek kebenaran yang ingin dicari (*truth*). Kebenaran menurut fenomenologi menjadi sangat cair, *fluid*, dan kehilangan bentuknya yang utuh sebagai sebuah nilai yang disepakati.

Ketika fenomenologi sangat bergantung terhadap kesadaran, baik kesadaran subyek

maupun obyek (dimana dalam fenomenologi relasi subyek-obyek juga sangat cair), maka subyektifitas di sini menjadi begitu dominan. Dominasi subyek dalam epistemologi fenomenologi menjadikannya ilmu yang sangat subyektif atau intersubyektif, dan karena itu sangat tidak bebas nilai (*value free*), tetapi sangat dibatasi oleh nilai (*value-bound*). Emanuel Levinas (1906-1995) dalam Magnis-Suseno (2000), mengkritik fenomenologi sebagai sebuah analisis yang terlalu cepat berhenti sehingga tidak berhasil mengangkat struktur realitas yang sebenarnya. Husserl berhenti pada struktur kesadaran. Karena itu Husserl terperangkap dalam kerangka subyek-obyek. Obyek hanya ada sebagai obyek dari subyek yang menangkapnya, dan sebaliknya. Dengan demikian, kita tidak bisa keluar dari penjara kesadaran. Mempertanyakan obyek itu pada dirinya sendiri tidak masuk akal. (Magnis-Suseno, 2000: 89).

Fenomenologi juga tidak bisa mengaskan obyektifitas, yang dalam epistemologi modern dianggap salah satu standar ilmu pengetahuan. Karena tidak obyektif, maka hasil-hasil yang didapat oleh fenomenologi hanya bersifat sementara, parsial, dan terikat dengan lokalitas, dengan kata lain, pengetahuan yang didapat dalam fenomenologi tidak bisa digeneralisasi. Artinya, kritik terhadap fenomenologi juga menyangkut tentang persoalan *reliable* yang dituntut dalam keilmuan.

Namun fenomenologi sampai saat ini masih berkembang dan masih terus digunakan oleh ilmuwan sosial, terbukti dengan masih terbitnya jurnal-jurnal khusus tentang fenomenologi seperti *The Indo-Pacific Journal of Phenomenology*, sehingga kritik yang ditujukan padanya selalu bisa direspon dengan dinamika yang masih terus berlangsung, mencari bentuknya yang sempurna.

IV. KESIMPULAN

Positivisme menjadi epistemologi yang paling dominan di zaman modern dewasa ini, bahkan era modern dijiwai oleh positivisme.

Sejak Comte mempopulerkan dalam bukunya yang terkenal *Cours de philosophie Positive* (1830), positivisme, yang juga sering disebut dengan “paradigma positivisme” diterima secara masif di hampir semua tradisi akademis di dunia. Dan epistemologi ini benar-benar mewarnai paradigma keilmuan, khususnya ilmu-ilmu sosial budaya.

Tetapi diakui, positivisme dengan sekian klaim khasnya seperti obyektif, bebas nilai, berlaku general, bukanlah satu-satunya cara memperoleh ilmu pengetahuan. Terbukti alternatif epistemologis muncul seiring dengan dominasi ini, sebut saja hermeneutik, strukturalisme, materialisme, post-modernisme dan tentu saja fenomenologi yang dibahas dalam makalah ini.

Fenomenologi, di awal kelahirannya seperti yang dijelaskan Husserl, ditujukan untuk menambal “krisis” ilmu pengetahuan yang menurutnya menghilangkan makna hidup. Memberlakukan manusia layaknya obyek-obyek dalam ilmu alam berarti melakukan dehumanisasi. Untuk itulah fenomenologi “dibangun” dalam rangka memperoleh pengetahuan yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sholeh, 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahimsa Putra, H. S. 1997. *Antropologi Koentjaraningrat: Sebuah Tafsir Epistemologi dalam Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Hal. 25-48. Editor: E. K. M. Masinambow. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ahimsa Putra, H. S. 2012. *Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama*. Jurnal IAIN Walisongo. Vol. 20. Nomor. 2. November 2012.
- Ulumuddin. 2006. *Jurgen Habermas dan Hermeneutika Kritis (Sebuah Gerakan Evolusi Sosial)*. Jurnal Hunafa. Vol. 3. No. 1. 1 Maret 2006.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sudarminta, J.. 2002. *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta. Kanisius.
- Riley, Dylan. 2007. *The Paradox of Positivism*. Social Science History, Vol. 31, No. 1 (Spring, 2007), pp. 115-126. Diambil dari: <http://www.jstor.org/stable/40267932> (26 Oktober 2017).
- Bryant, Christopher G.A.. 1985. *Positivism in Social Theory and Research: Theoretical Traditions in The Social Sciences*. London: Macmillan Publisher.
- Subchi, Imam. 2001. *Dialog Kebudayaan: Teori dan Metodologi (Perspektif Antropologi)*. Jakarta. Jurnal Mimbar Agama dan Budaya. Vol. XVIII. No. 4.
- Watloly, Ahliab. 2001. *Tanggungjawab Pengetahuan: Mempertimbangkan Epistemologi secara Kultural*. Yogyakarta: Kanisius.
- Russell, Betrand. 2007. *Sejarah Filsafat Barat; Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Hasbiansyah, O. 2008. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*. Mediator. Vol. 9. No. 1. Juni 2008.
- Sukarno, B. 2005. *Tinjauan Filosofis tentang Pancasila sebagai Filsafat*. Solo: Sebelas Maret University Press.
- Bentz, V.M. 1995. Husserl, Scutz, “Paul” and Me: Reflection on Writing Phenomenology. Human Studies, Vol. 18, No. 1, Intersubjectivity

as a Practical Matter and Problematic Achievement (Jan., 1995), pp. 41-62
Diambil dari: <http://www.jstor.org/stable/40267932> (26 Oktober 2017).

Comte, Auguste. 1858. *Positive Philosophy*.
Diterjemahkan oleh: Harriet Martineau.
New York: Calvin Blanchard.

Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta. Kanisius.

Irianto, Sulistyowati. 1997. *Konsep Kebudayaan Koentjaraningrat dan Keberadaannya dalam Paradigma Ilmu-ilmu Sosial*. Dalam *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, Masinambow, E.K.M., (ed), (hal 49-60). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hardiman, F. Budi. 2007. *Filsafat Fragmentaris: Deskripsi, Kritik dan Dekonstruksi*. Yogyakarta. Kanisius.

Hom, Beck Andreas. 2013. *Philosophy of Science: An Introduction for Future Knowledge Workers*. Frederiksberg. Samfundslitteratur.

Smith, Linda & Reaper, William. *Ide-ide Filsafat dan Agama: Dulu dan Sekarang*. Yogyakarta. Kanisius.

Bakker, Anton. 1995. *Antropologi Metafisik*. Kanisius. Yogyakarta.

Halim, Syaiful. 2017. *Semiotika Dokumenter. Membongkar Dekonstruksi Mitos dalam Media Dokumenter*. Yogyakarta. Deepublish.

Magnis-Suseno, Franz. 2000. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta. Kanisius.

Magnis-Suseno, Frans. 2005. *Pijar-pijar Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius.

Irianto, Sulistyowati, dkk. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesenjangan dan Keadilan*. Jakarta. Obor.